

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan investasi karena menyediakan informasi yang jelas mengenai kesehatan finansial suatu perusahaan. Dengan mencakup aspek-aspek utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, laporan keuangan membantu pemilik bisnis dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, serta mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan akurat memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban regulasi serta membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Bagi investor dan pemberi pinjaman, laporan keuangan menjadi dasar utama dalam menilai prospek dan risiko suatu investasi. Dengan menganalisis pendapatan, biaya, profitabilitas, serta likuiditas perusahaan, investor dapat menentukan apakah suatu perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang baik atau menghadapi tantangan keuangan. Keakuratan laporan keuangan juga penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan regulasi, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap laporan keuangan menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan ekonomi yang cerdas di dunia bisnis dan investasi.

Informasi akuntansi yang berkualitas memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Menerapkan sistem informasi akuntansi yang efektif memungkinkan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi ini membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja operasional, menilai efektivitas strategi bisnis, serta

merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Selain itu, informasi akuntansi yang andal juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis risiko secara lebih akurat, sehingga keputusan yang diambil dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian sumber daya.

Tidak hanya bagi manajemen, informasi akuntansi yang berkualitas juga sangat penting bagi pihak eksternal, seperti investor dan kreditor, dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Investor memanfaatkan laporan keuangan untuk menentukan prospek keuntungan dan risiko dari investasi mereka, sementara kreditor menggunakannya untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Jika informasi akuntansi tidak akurat atau tidak dapat diandalkan, keputusan ekonomi yang diambil oleh pemangku kepentingan dapat menjadi keliru, yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial atau bahkan kegagalan bisnis. Oleh sebab itu, memiliki sistem informasi akuntansi yang baik menjadi keharusan bagi setiap perusahaan guna memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan adalah informasi yang berkaitan dengan laba perusahaan. Bagi para pemegang saham dan investor, laba dianggap sebagai indikator peningkatan nilai ekonomis (kekayaan) yang dapat diwujudkan melalui pembagian dividen (Boediono, 2005). Fokus investor yang lebih tertuju pada besaran laba yang dilaporkan oleh perusahaan, tanpa mempertimbangkan metode atau prosedur yang digunakan dalam penyusunannya, membuka peluang bagi manajer melakukan praktik manajemen laba (Beattie et al., 1994 dalam Subekti, 2005).

Manajemen laba dianggap sebagai strategi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laporan keuangan demi mencapai tujuan tertentu. Praktik ini sering dilakukan dengan cara mengatur pendapatan atau biaya agar terlihat lebih stabil atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Scott (2000), terdapat beberapa motivasi utama dalam manajemen

laba, di antaranya rencana bonus, perjanjian utang (*debt covenant*), dan penghindaran biaya politik. Manajer cenderung mengelola laba untuk memperoleh insentif kompensasi yang lebih tinggi, mengurangi risiko pelanggaran perjanjian utang dengan kreditor, serta menghindari intervensi pemerintah akibat eksposur politik yang tinggi.

Selain itu, manajemen laba juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya, seperti peningkatan nilai saham, kepatuhan terhadap regulasi anti-monopoli, dan pengurangan beban pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sering melakukan manajemen laba untuk menarik investor dengan menampilkan kinerja keuangan yang tampak lebih baik dibandingkan kondisi sebenarnya (DeChow, 1994; Teoh et al., 1997). Selain itu, perusahaan dapat menyesuaikan laporan keuangan guna menghindari sanksi akibat pelanggaran regulasi antitrust atau untuk mengurangi kewajiban pajak (Cahan, 1992; Guenter, 1994). Meskipun praktik ini dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi perusahaan dan manajemen, manajemen laba dapat menimbulkan risiko bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya jika tidak dilakukan secara transparan dan etis.

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan praktik di mana manajemen perusahaan secara sengaja melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan tujuan mengubah atau menyesuaikan angka-angka laba agar terlihat lebih stabil, meningkat, atau bahkan menurun sesuai dengan kepentingan tertentu. Schipper (1989) dalam Ningsaptiti (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajerial yang disengaja dalam penyusunan laporan keuangan guna mempengaruhi persepsi pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan. Praktik ini berpotensi mengurangi relevansi dan keandalan pernyataan keuangan, karena informasi yang disajikan tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi keuangan perusahaan secara nyata. Akibatnya, pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan regulator, dapat dirugikan akibat keputusan yang didasarkan pada data yang kurang akurat (Susanti & Margareta, 2019). Manajemen laba sering kali terjadi

akibat konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) atau disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*) (Murni, 2016; Widyaningdyah, 2001). Ketidakseimbangan ini memberikan peluang bagi manajemen untuk merekayasa laporan keuangan demi keuntungan tertentu, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham (Raharja, 2014 dalam Susanti & Margareta, 2019).

PSAK memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat bagi perusahaan. Ketentuan ini konsisten dengan pendekatan teori akuntansi positif, yang menyatakan bahwa Perusahaan memiliki preferensi dalam memilih prosedur akuntansi tertentu dalam upaya mengurangi biaya kontrak dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Namun, kebebasan ini juga dapat membuka peluang bagi manajer untuk bertindak secara oportunistik (*opportunistic behavior*) dengan melakukan manajemen laba demi kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek perusahaan (Scott, 2009). Oleh sebab itu, meskipun secara teknis praktik manajemen laba tidak selalu melanggar standar akuntansi, penerapannya dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan merugikan pemangku kepentingan.

Penelitian ini berfokus pada praktik manajemen laba pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menjadi penting mengingat peran strategis sektor perbankan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola aset keuangan masyarakat. Oleh karena itu, industri perbankan termasuk dalam kategori industri yang sangat diatur (*highly regulated industry*) guna melindungi nasabah serta menjaga stabilitas ekonomi dari tindakan manajerial yang dapat merugikan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, sektor perbankan menguasai sekitar 80% dari total aset keuangan dalam sistem keuangan Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan sektor non-bank yang hanya memiliki porsi 20%. Bank memperoleh aset

tersebut melalui penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran kredit, serta penyediaan layanan perbankan lainnya. Sebagai entitas bisnis, manajer bank memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan laba guna memenuhi ekspektasi pemegang saham. Namun, di sisi lain, pencapaian laba yang tinggi juga berpotensi memberikan keuntungan bagi manajer sendiri, seperti peningkatan insentif dan bonus (Hughes & Master, 1994). Keadaan tersebut dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba guna menyajikan kinerja keuangan yang tampak lebih optimal.

Beberapa praktik manajemen laba dalam sektor perbankan di Indonesia dapat ditemukan pada sejumlah kasus yang melibatkan Bank Bukopin, Bank Century, serta Bank Lippo. Bank Bukopin mengalami revisi laporan keuangan tahun 2016 setelah ditemukan adanya manipulasi terkait pendapatan provisi dan komisi kartu kredit. Akibatnya, laba bersih Bank Bukopin mengalami penurunan signifikan dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar. Selain itu, produk pembiayaan usaha Bank Syariah Bukopin (BSB) juga mengalami penurunan nilai debitur, yang berujung pada peningkatan biaya penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan (sumber: CNBC Indonesia).

Selanjutnya, kasus Bank Century bermula ketika bank ini ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Menurut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antonius Budi Satria, penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh dana penyelamatan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sejak 24 November 2008 hingga Juli 2009, Bank Century menerima suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp6,76 triliun. Kebijakan ini dinilai telah menimbulkan kerugian keuangan negara melalui pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Pada Oktober 2009, LPS akhirnya mengambil alih lebih dari 90% saham Bank Century, yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara. Dampak dari kasus ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghilangkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, karena banyak nasabah yang menuntut pengembalian dana mereka (Irawadi, 2017).

Permasalahan internal Bank Century melibatkan tindakan penipuan oleh pihak manajemen terhadap nasabah. Tindakan ini meliputi penyelewengan dana nasabah sebesar Rp2,8 triliun, yang terbagi antara nasabah Bank Century dan nasabah Antaboga Delta Sekuritas Indonesia masing-masing sebesar Rp1,4 triliun. Selain itu, manajemen juga menjual produk reksa dana fiktif milik Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, yang ternyata tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maupun Bapepam-LK. Akibatnya, para nasabah mengalami kerugian besar dan kesulitan dalam mengakses dana mereka (Irawadi, 2017).

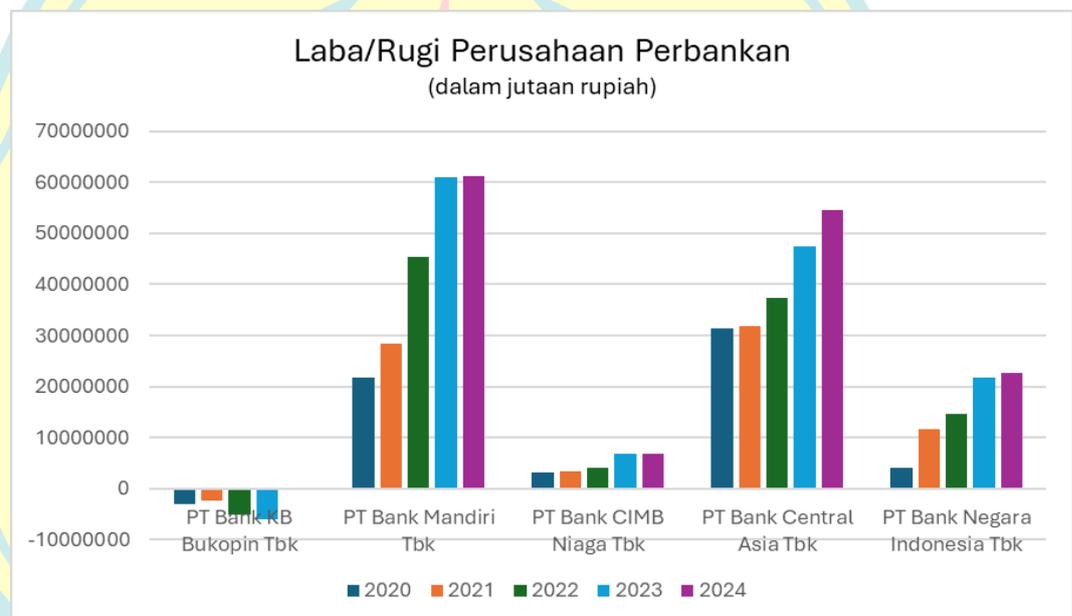
Faktor lain yang menyebabkan kebangkrutan Bank Century adalah penyimpangan manajemen serta lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia. Salah satu modus yang digunakan adalah penempatan dana secara sembrono di pasar uang, sehingga Bank Century memiliki kewajiban surat berharga valas hingga mencapai US\$210 juta. Praktik ini memperlihatkan bahwa manajemen Bank Century telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Selain itu, Bank Indonesia memberikan kelonggaran aturan dengan memperbolehkan Bank Century mengklasifikasikan surat-surat berharga bermasalah sebagai aset lancar. Kebijakan ini membuat Bank Century tidak perlu menyisihkan cadangan kerugian, sehingga kondisi modalnya tidak terganggu secara langsung (Irawadi, 2017).

Kejadian ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Perbankan BI, mengingat manajemen Bank Century rutin menyampaikan laporan keuangan harian dan mingguan. Tidak hanya BI, Bapepam sebagai otoritas pasar modal juga dinilai turut bertanggung jawab atas kelalaian ini, mengingat status Bank Century sebagai perusahaan publik. (Irawadi, 2017)

Dalam kasus manipulasi laporan keuangan Bank Lippo, bank tersebut menerbitkan tiga edisi laporan keuangan yang berbeda per 30 September 2002 yang menunjukkan perbedaan signifikan. Pertama, laporan yang disampaikan ke publik melalui media massa pada 28 November 2002 mencatat laba bersih sebesar Rp98 miliar. Kedua, laporan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta

(BEJ) pada 27 Desember 2002 justru menunjukkan rugi bersih sebesar Rp1,3 triliun. Ketiga, laporan hasil audit yang diterbitkan pada 6 Januari 2003 mencatat rugi bersih sebesar Rp1,273 triliun (Dimmer, 2022).

Perbedaan yang mencolok antara ketiga laporan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset yang diambil alih (Agunan Yang Diambil Alih/AYDA), dari semula Rp2,393 triliun menjadi Rp1,42 triliun (Dimmer, 2022). Kasus ini merepresentasikan perilaku manajemen Bank Lippo yang memanipulasi penyajian informasi keuangan untuk menciptakan citra yang lebih baik atas kinerja perusahaan daripada yang sesungguhnya.



Gambar 1. 1 Laba/Rugi Perusahaan Perbankan Tahun 2020-2024

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Setiap kasus yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan pentingnya penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi riil perusahaan, agar tidak menyesatkan pengguna laporan maupun investor dalam proses pengambilan keputusan. Praktik manajemen laba yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian besar dan menggerus kepercayaan terhadap perusahaan. Maka, penerapan tata Kelola perusahaan menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen

perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat mekanisme yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengawasi operasi perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan wajib menerapkan tata kelola perusahaan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan. Sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi perusahaan yang menerapkannya. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), terdapat lima prinsip utama dalam tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berperan dalam mendorong perilaku manajerial yang produktif serta secara konsisten mampu menekan praktik manajemen laba.

Upaya manajemen perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik antara lain dengan menyajikan informasi terkait posisi finansial, kinerja operasional, serta perubahan kondisi keuangan perusahaan. Informasi ini ditujukan kepada pemilik eksternal perusahaan yang memiliki kekuatan besar untuk menekan manajemen agar menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi keuangan sangat penting karena akan memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemilik eksternal tersebut.

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan keberadaan dewan komisaris independen merupakan tiga bentuk praktik tata kelola perusahaan yang dipercaya dapat mengurangi masalah keagenan. Ketiganya berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang dirancang untuk mendamaikan beragam kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan.

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh entitas atau institusi tertentu, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang ideal. Kepemilikan institusional dipandang mampu menekan praktik manajemen laba, karena pihak manajemen menganggap investor institusional sebagai pihak yang memiliki kecakapan tinggi (*sophisticated investors*) dalam melakukan pengawasan, sehingga keberadaan mereka dapat menurunkan dorongan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba (Sudiyanto, 2016).

Kepemilikan manajerial mengacu pada situasi di mana manajer perusahaan merupakan bagian dari manajemen dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan dengan memegang kepemilikan saham. Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, melainkan justru tergoda guna memperoleh peningkatan dalam kesejahteraan diri. (Lestari et al, 2024).

Dewan komisaris merupakan elemen utama dalam struktur tata kelola perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan serta memberikan arahan strategis kepada direksi, termasuk dalam memantau pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam dewan, maka efektivitas pengawasan terhadap manajemen dalam proses pengambilan keputusan akan meningkat, sehingga mampu memperkuat integritas informasi keuangan (Amaliyah & Rachmawati, 2019). Menurut Wardhani (2007), salah satu permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terletak pada dominasi kekuasaan yang lebih besar pada CEO dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal, dewan komisaris memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi yang berada di bawah kepemimpinan CEO. Oleh karena itu sangat diperlukannya komisaris Independen sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Dalam POJK Nomor 33/POJK 04/2014, ketentuan ini menyatakan bahwa proporsi anggota independen harus sekurang-kurangnya 30% dari total jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga harus

membentuk komite audit sebagai perangkat pendukung dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selanjutnya, ukuran perusahaan merupakan faktor yang diduga mempengaruhi tingkat manajemen laba, karena mencerminkan besarnya aset, pendapatan, serta kapitalisasi pasar yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya mendapatkan perhatian lebih dari pemegang saham, regulator, dan masyarakat luas, sehingga mereka lebih sulit melakukan manipulasi laporan keuangan. Pengawasan yang ketat dari pihak eksternal dan tuntutan untuk menjaga reputasi mendorong perusahaan besar untuk lebih transparan dalam penyajian laporan keuangan mereka. Namun, di sisi lain, tekanan dari investor dan tuntutan pencapaian target kinerja juga dapat mendorong perusahaan besar untuk melakukan praktik manajemen laba guna memenuhi ekspektasi pasar (Purnama & Taufiq, 2021; Taufiq, 2022).

Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih ketat serta diaudit oleh firma audit dengan reputasi tinggi seperti *Big Four*, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba. Selain itu, perusahaan besar cenderung lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan karena mendapatkan sorotan lebih dari publik dan investor. Sebaliknya, perusahaan kecil yang memiliki pengawasan lebih rendah serta sumber daya yang terbatas lebih rentan melakukan manajemen laba, baik untuk menarik investor maupun untuk mempertahankan stabilitas finansial mereka (Agyei-Mensah, 2017).

Dengan demikian, pemahaman terhadap interaksi antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan dewan komisaris independen, serta ukuran perusahaan menjadi hal yang krusial dalam konteks praktik manajemen laba, karena masing-masing variabel ini saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap keputusan pelaporan keuangan perusahaan.

Studi terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan praktik manajemen laba. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pramudhita (2017) dan Gunawan (2015), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, semakin besar suatu entitas bisnis, maka semakin tinggi pula potensi terjadinya praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan dari para investor terhadap perusahaan berskala besar, yang mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan laba guna menjaga citra korporasi. Namun demikian, temuan dari Astuti (2017) dan Purnama (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar justru cenderung lebih transparan dalam menyajikan informasi keuangannya. Sementara itu, hasil penelitian oleh Agustia dan Suryani (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba, menunjukkan bahwa faktor lain juga berperan dalam menentukan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan.

Literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba masih beragam dan tidak konsisten, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen laba (Rahmat & Istianingsih, 2023; Nurani & Yuliati, 2021). Sementara itu, beberapa penelitian lain telah mengkonfirmasi dampak negatif dari keberadaan dewan komisaris independen terhadap praktik manajemen laba (Rozy & Fitria, 2024). Selain itu, kepemilikan institusional dan komite audit juga menunjukkan hasil yang bervariasi, di mana beberapa penelitian menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Rahmat & Istianingsih, 2023; Rozy & Fitria, 2024), sedangkan penelitian lain tidak menemukan hubungan yang signifikan (Nurani & Yuliati, 2021). Demikian pula, ukuran perusahaan juga telah terbukti memiliki dampak positif pada praktik manajemen pendapatan (Rozy & Fitria,

2024), tetapi penelitian lain tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan (Nurani & Yuliati, 2021). Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan bukti empiris lebih lanjut untuk memahami hubungan antara faktor-faktor kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba secara lebih mendalam.

Adanya ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini menjadi penting karena kami melakukan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris tambahan mengenai dampak dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba, khususnya pada sektor perbankan. Sejauh ini, penelitian yang menghubungkan kelima variabel tersebut dengan manajemen laba masih relatif langka, terutama penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena ini di sektor perbankan. Mengingat karakteristik operasional dan kerangka peraturan yang berbeda yang mengatur industri perbankan dibandingkan dengan sektor lain, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan baru tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, dan ukuran perusahaan pada praktik manajemen laba di perbankan. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi para akademisi, praktisi industri, dan badan pengawas dengan meningkatkan pemahaman mereka dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas manajemen laba.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?

- 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 3) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?
- 5) Apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dibuat sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
- 2) Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
- 3) Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
- 4) Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
- 5) Menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi. Melalui pengujian pengaruh variabel-variabel seperti kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, keberadaan dewan komisaris independen, serta ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba, studi ini bertujuan untuk memperluas kajian teoritis terkait determinan manajemen laba, khususnya dalam industri perbankan di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi penelitian lanjutan, serta memberikan perspektif baru terkait dengan hubungan antara faktor internal Perusahaan, eksternal, skala Perusahaan, dan kebijakan manajemen laba.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini menawarkan pemahaman yang mendalam bagi perusahaan, khususnya dalam sektor perbankan, mengenai elemen-elemen yang memengaruhi kebijakan manajemen laba. Dengan menganalisis hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan dewan komisaris independen, serta ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan perbaikan pada struktur tata kelola perusahaan. Hal ini dapat memperkuat kredibilitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan, serta mencegah praktik manipulasi laba yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan perusahaan.

b. Bagi Investor

Memberikan pemahaman kepada para investor mengenai elemen-elemen yang memengaruhi integritas laporan keuangan pada institusi perbankan, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang berguna bagi otoritas pengawas pasar modal dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, terutama dalam pengawasan terhadap praktik pelaporan keuangan dan manajemen laba.

